



BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek pada bagian Tabungan yang bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penarikan dan penyetoran tabungan . Dalam pelaksanaannya penulis dibantu oleh staf pelaksana tabungan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis memakai alat bantu komputer beserta aplikasi-aplikasinya untuk mengolah data yaitu: MS Word dan MS Excel. Dalam minggu pertama terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2002 penulis sudah mulai melaksanakan :

- Proses penarikan dan
- Penyetoran tabungan secara langsung.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Aktivitas Usaha Bank Jabar

Selama tahun 1998 perekonomian nasional mengalami penurunan , pertumbuhan ekonomi sampai akhirn tahun 1998 mengalami kontraksi sebesar 13,68 % dengan tingkat inflasi mencapai sebesar 77, 63 % . Berbagai kebijakan pemerintah di

bidang moneter melalui institusi perbankan khususnya kebijakan bunga tinggi belum mampu menekan laju inflasi nasional. Di lain pihak dengan kebijakan tersebut sektor perbankan mengalami negative spread yang mengakibatkan menurunnya kegiatan di sektor riil.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional semakin menurun sebagai dampak dibekukannya izin operasi sejumlah Bank Umum oleh pemerintah sekitar pertengahan tahun 1998. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan di Indonesia belum cukup tangguh pada tingkat mikro seperti terlihat pada sektor permodalan yang lemah serta kualitas porfolio kredit yang rendah , sehingga untuk menyehatkan sektor perbankan pemerintah melakukan program restrukturisasi perbankan yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai tahun 2001.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang belum menentu Bank Jabar menetapkan target pasar, melalui kegiatan perbankan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana lebih diarahkan kepada penghimpunan dana masyarakat melalui upaya peningkatan mutu pelayanan, kegiatan pemasaran dan diversifikasi produk yang inovatif.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif, sedangkan untuk dana-dana yang tidak tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana (placement) dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

3. Jasa Layanan Perbankan

Jasa layanan perbankan diarahkan dengan memberi jasa layanan yang dibutuhkan masyarakat melalui peningkatan teknologi, jaringan kantor serta kemitraan.

Dalam rangka mencapai misi dan tujuannya Bank Jabar melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Perhimpunan Dana, yang berasal dari masyarakat dan pemerintah berupa :
 - a. Giro :
 - Rupiah
 - Valas
 - b. Deposito :
 - Deposito Berjangka Rupiah & Valas
 - Deposito Berjangka Diskonto
 - Sertifikat Deposito

c. Tabungan :

- Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)
- Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
- Jabar Okey

d. Surat Berharga yang diterbitkan :

- Obligasi

2. Penggunaan Dana, terutama disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dengan berbagai jenis dan sektor usaha yang terdiri dari :

a. Kredit Umum :

- Kredit Modal Kerja Umum
- Kredit Usaha Kecil
- KMKK Sistem KEPPRES
- Kredit Profesi
- Kredit Pegawai
- Kredit Pensiun

b. Kredit Program :

- KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya)
- KUT (Kredit Usaha Tani)
- KKPATR (Kredit Tebu Rakyat)
- Kredit Dana Bergulir



- KUK DAS (Kredit Untuk Konservasi Daerah Aliran Sungai)
- KPRS / RSS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana / Rumah Sangat Sederhana)
- KPKM (Kredit Pengusaha Kecil Dan Mikro)
- Kkop (Kredit Kepala Koperasi)
- Kredit Mikro

Untuk optimalisasi pendapatan, dana yang tidak tersalurkan dalam bentuk kredit, dilakukan terhadap : penempatan pada beberapa Bank, pembelian surat berharga dan penyertaan.

3. Jasa-jasa Bank

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta meningkatkan “ *fee based income* ” (pendapatan diluar bunga), Bank Jabar memberikan jasa-jasa sebagai berikut :

- a. Kiriman Uang
- b. Inkaso
- c. Jaminan Bank
- d. Penerimaan pembayaran rekening Telepon, PDAM, Pajak.

3.3.2 Kebijakan Manajemen Umum Bank Jabar

Dalam kondisi perekonomian sampai saat ini masih belum stabil, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 1999 diperkirakan masih mengalami kontraksi yaitu sebesar 3,4 % dengan tingkat laju inflasi diperkirakan bekisar antara 15 %

sampai 20 %. Kondisi perekonomian yang tidak menentu tersebut sebagai dampak gejolak moneter yang berkepanjangan serta dipicu oleh suhu politik yang memanas dengan serangkaian kegiatan politik pada tahun 1999.

Dibidang perbankan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan untuk penyehatan perbankan dengan melakukan restrukturisasi perbankan dan rekapitalisasi perbankan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi demikian strategi pengembangan usaha Bank Jabar lebih dititik beratkan pada program perbaikan dengan menerapkan penghematan biaya, komsolidasi jaringan kantor serta pengembangan organisasi dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan usaha disamping merubah bentuk hukum PD (Perusahaan Daerah) menjadi PT (Perseroan Terbatas) untuk menjaring potensi yang ada serta keleluasaan gerak operasional.

Manajemen Bank Jabar menerapkan serangkaian kebijakan dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu :

1. Kebijakan dalam menyalurkan dana, baik dalam penempatan dana maupun dalam perkreditan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
2. Sejalan dengan strategi pengembangan usaha, rencana dan pelaksanaan operasional dilaksanakan dengan lebih menitik

beratkan kepada penerapan compliance to prudencial regulations, penghematan biaya, konsolidasi jaringan kantor serta pengembangan organisasi dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan usaha.

3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) diseluruh unit kerja, guna menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan in-efisiensi
4. Berorientasi kepada pasar yang diarahkan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan dengan lebih menitik beratkan pada pelayanan yang unggul untuk dapat bersaing dengan baik.

Dalam rangka pemantapan kepengurusan dan pengendalian manajemen Bank Jabar telah dibentuk Dewan Audit yang mempunyai tugas membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap manajemen bank sesuai dengan Standar Pelaksanaan.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Bank Jabar

Kebijakan akuntansi Bank Jabar berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Perbankan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan untuk tahun buku 1998 disusun berdasarkan instruksi Direksi Nomor : 28/IN-AK/200/98 tanggal 15 Desember 1998 perihal penutupan Tahun Buku 1998. Pedoman tersebut telah sesuai dengan PSAK No.31.

2. Penyusutan Neraca Laporan Komitmen dan Kontijensi, perhitungan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan

Bank Jabar membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas di wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Seluruh kebijakan akuntansi kantor cabang dan kantor kas ditetapkan oleh kantor pusat.

Kantor cabang merupakan cabang bebas, namun kantor cabang melaksanakan pembukuan dengan sistem kantor dan prosedur kantor pusat. Dalam pengendalian akuntansi terhadap kantor cabang dalam hubungan antar kantor, digunakan sistem pembukuan sentral, yaitu pembukuan kantor cabang menunjuk rekening kantor pusat.

Laporan keuangan Bank Jabar disusun secara bulanan dengan menggabungkan angka-angka neraca, laporan komitmen dan kontijensi, laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan antara kantor pusat dengan kantor cabang.



4. P - 100,00 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan

Macet

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah sebagai berikut :

- a. Giro, deposito, tabungan dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valas yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan dengan nilai setinggi-tingginya 100 %.
- b. Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Pemerintah dengan setinggi-tingginya 100 %.
- c. Surat Berharga dengan nilai setinggi-tingginya 50 % atas dasar nilai pasar yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan.
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut yang setinggi-tingginya sebesar :

- 70 % untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 (enam) bulan
- 50 % untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 bulan
- 30 % untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan.
- 0 % untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 bulan.

4. Pengeluaran Biaya dan Pengeluaran Modal

Berdasarkan surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat No 70/SK-DIR/95 tanggal 31 November 1995 bahwa untuk pengeluaran biaya modal mulai tahun buku 1995 sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pendapatan adalah sebagai berikut :
 - semua pembelian barang untuk investasi yang harga dan perolehannya per unit kurang dari Rp. 250.000,00
 - semua pembayaran yang dikeluarkan untuk perbaikan, penambahan, penggantian komponen aktiva tetap dan inventaris yang besarnya kutang dari 25 % dari harga perolehan bangunan dan kendaraan 50 % dari harga perolehan inventaris kantor.
- b. Pengeluaran Modal sebagai berikut :
 - Semua pembelian barang untuk inventaris yang harga dan perolehannya per unit kurang dari Rp.250.000,00
 - Semua pembayaran yang dikeluarkan untuk perbaikan, penambahan, penggantian komponen aktiva tetap dan inventaris yang besarnya kurang dari 25 % dari harga perolehan bangunan dan kendaraan dan 50 % dari harga perolehan inventaris kantor.

